



**KEPAHIANG**

**SELASA, 24 MEI 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Klaim Tuntaskan 80 Persen Temuan BPK**

**KEPAHIANG** – Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang mengklaim bahwa Pemkab Kepahiang telah menuntaskan 80 persen hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu. Hanya saja sampai saat ini Pemkab Kepahiang belum mau membeberkan berapa nominal temuan yang sudah dikembalikan dari persentase 80 persen tersebut.

Plt Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang, Ardiansyah, SH, MH

mengaku tinggal 20 persen lagi penyelesaian atas temuan BPK tersebut. Dia optimis dalam 60 hari pascakeluarnya LHP BPK pada 13 Mei lalu, seluruh temuan atas LKPD akan tuntas 100 persen. "Secara menyeluruh memang sudah dilakukan tindak lanjut oleh 8 OPD yang memiliki catatan dan temuan. Memang belum seluruhnya dilakukan pembayaran," jelas Ardiansyah.

Mengenai jumlah temuan dan berapa yang sudah dilakukan penyelesaian, Ardiansyah belum mau membeberkannya saat ini. Hanya saja beberapa OPD diakuinya sudah menuntaskan 100 persen temuan. Diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas

Kesehatan (Dinkes). OPD lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Sekretariat Dewan (Setwan) hanya tersisa sedikit lagi.

"Selama 60 hari itulah yang menjadi Pekerjaan Rumah kita untuk dilakukan penagihan. Kita yakin dalam jangka 60 hari sejak LHP diterbitkan akan tuntas 100 persen," ucapnya.

Ditanya, apa langkah yang diambil jika tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Bengkulu tidak tuntas 100 persen, walaupun sudah diberikan waktu selama 60 hari, Ardiansyah yakin bisa lunas. "Temuan itu ada belanja barang dan belanja modal, saya yakin itu tuntas sesuai waktu

yang telah ditentukan BPKRI," pungkaskannya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang Andrian Defandra, SE, M.Si mengatakan dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Kepahiang akan menggelar rapat mengenai LHP BPK tersebut. DPRD akan mendorong Pemkab untuk segera menyelesaikan seluruh temuan-temuan yang ada sebelum 60 hari pasca-LHP diterbitkan.

"Kami juga nantinya akan meminta penjelasan mengenai TGR yang telah diselesaikan. Bila Pemkab tidak mau menyampaikannya kepada publik, maka dewan yang berinisiatif mengemukakannya kepada publik melalui media," sebutnya. (sly)